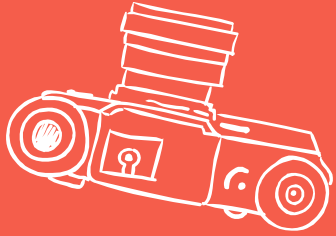


**TREN
PENINDAKAN
KASUS
KORUPSI
Pengadaan
Barang dan Jasa
TAHUN 2019**





pendahuluan

- ✘ Tren Penindakan Kasus Korupsi adalah data yang dipublikasi oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) setiap tahun.
- ✘ Data ini berisi informasi kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum sepanjang 2019



Metodologi



Sumber Data

- ✘ Media massa
- ✘ Media daring
- ✘ Siaran pers penegak hukum

Waktu

- ✘ 1 Januari – 31 Desember 2019
- 
- 
- 
- 
- 
- 



**Yuk Simak
Temuannya!**

TEMUAN UMUM



Jumlah kasus

Dari 271 kasus korupsi yang terjadi selama 2019, **sebanyak 64% atau 174** terkait pengadaan



Jumlah tersangka
389 orang



Jumlah suap
Rp 91,5 miliar



Jumlah kerugian Negara

Rp 957,34 Miliar



Jumlah pungutan liar

Rp 1,5 miliar



Kerugian Negara sebanyak itu bisa untuk apa ya?

Kerugian Negara **Rp 957,34 Miliar** setara dengan:

- 26.592 buah sepeda Brompton S2L flame lacquer 2019, bahkan masih kembali Rp 20 juta.
- 19.146.792 gelas kopi kekinian, bahkan masih kembali Rp 3.374.

Barang dan Jasa BERDASARKAN MODUS

Berikut ini adalah modus yang digunakan dalam melakukan korupsi di pengadaan

No	Modus	Jumlah Kasus
1	Mark up/ penggelembungan harga	40
2	Suap-menyuap	25
3	Penggelapan	24
4	Penyalahgunaan Anggaran	23
5	Kegiatan/ Proyek Fiktif	22
6	Laporan Fiktif	18
7	Penyalahgunaan Wewenang	16
8	Pemerasan	2
9	Gratifikasi	2
10	Penyunatan/ Pematangan	1
11	Pungutan liar	1

Berdasarkan 10 Sektor Terbanyak

Berikut adalah 10 besar sektor yang paling banyak terjadi kasus korupsi pengadaan barang dan jasanya.

No	Sektor	Jumlah Kasus
1	Anggaran Desa	36
2	Transportasi	30
3	Pemerintahan	18
4	Pendidikan	12
5	Pengairan	10
6	Pertanahan	10
7	Kesehatan	8
8	Perdagangan	5
9	Sosial Kemasyarakatan	5
10	Bencana Alam	5

Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa 10 Terbanyak

Berikut adalah 10 besar latar belakang pelaku korupsi pengadaan barang dan jasa

No	Aktor/ Pelaku Korupsi	Jumlah Tersangka (orang)
1	Aparatur Sipil Negara	153
2	Swasta	125
3	Kepala Desa	33
4	Aparatur Desa	15
5	Bupati	12
6	Anggota DPRD	12
7	Karyawan BUMN	9
8	Warga	5
9	Walikota	4
10	Karyawan BUMD	3

Penegak Hukum yang Menangani

- ✘ Jika dilihat berdasarkan lembaga yang menangani kasus korupsi pengadaan barang dan jasa, maka datanya sebagai berikut:

No	Lembaga Penegak Hukum	Jumlah Kasus
1	Kejaksaan	70
2	Kepolisian	68
3	KPK	36
Total		174

Contoh kasus korupsi yang pernah terjadi di Indonesia

- **Korupsi pengadaan KTP Elektronik**

Dalam APBN 2011 – 2013, Kementerian Dalam Negeri, menganggarkan pengadaan KTP Elektronik RP 5,9 Triliun. Dikemudian hari, diketahui pengadaan ini dikorupsi dan mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 2,3 Triliun. Setidaknya sudah ada 14 tersangka yang sudah ditetapkan oleh KPK, termasuk diantaranya Setya Novanto.

Setya Novanto (SN) diketahui menerima komisi sebesar US\$ 7,3 juta untuk memuluskan pembahasan anggaran KTP Elektronik di DPR dan meminta pengusaha yang mengerjakan proyek KTP elektronik untuk memberikan komisi sebesar 5 persen untuk para anggota DPR RI di Komisi II. Selain itu, dalam kasus ini harganya pun di gelembungkan sampai 4 kali lipat.

Kerugian negara dari Proyek KTP Elektronik setara dengan 63.889 buah sepeda Brompton S2L flame lacquer 2019

Contoh kasus korupsi yang pernah terjadi di Indonesia

- Korupsi pengadaan Al-Quran di Kementerian Agama

Kementerian Agama menganggarkan pengadaan Al-quraan pada APBNP 2011 dan APBN 2012.

Modus yang digunakan, Zulkarnaen (anggota DPR Fraksi Golkar) dan Dendy (Anal Zulkarnaen) dan Fadh, mengintervensi pejabat Kementerian Agama untuk memenangkan perusahaan tertentu dalam pengadaan Al-quraan di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

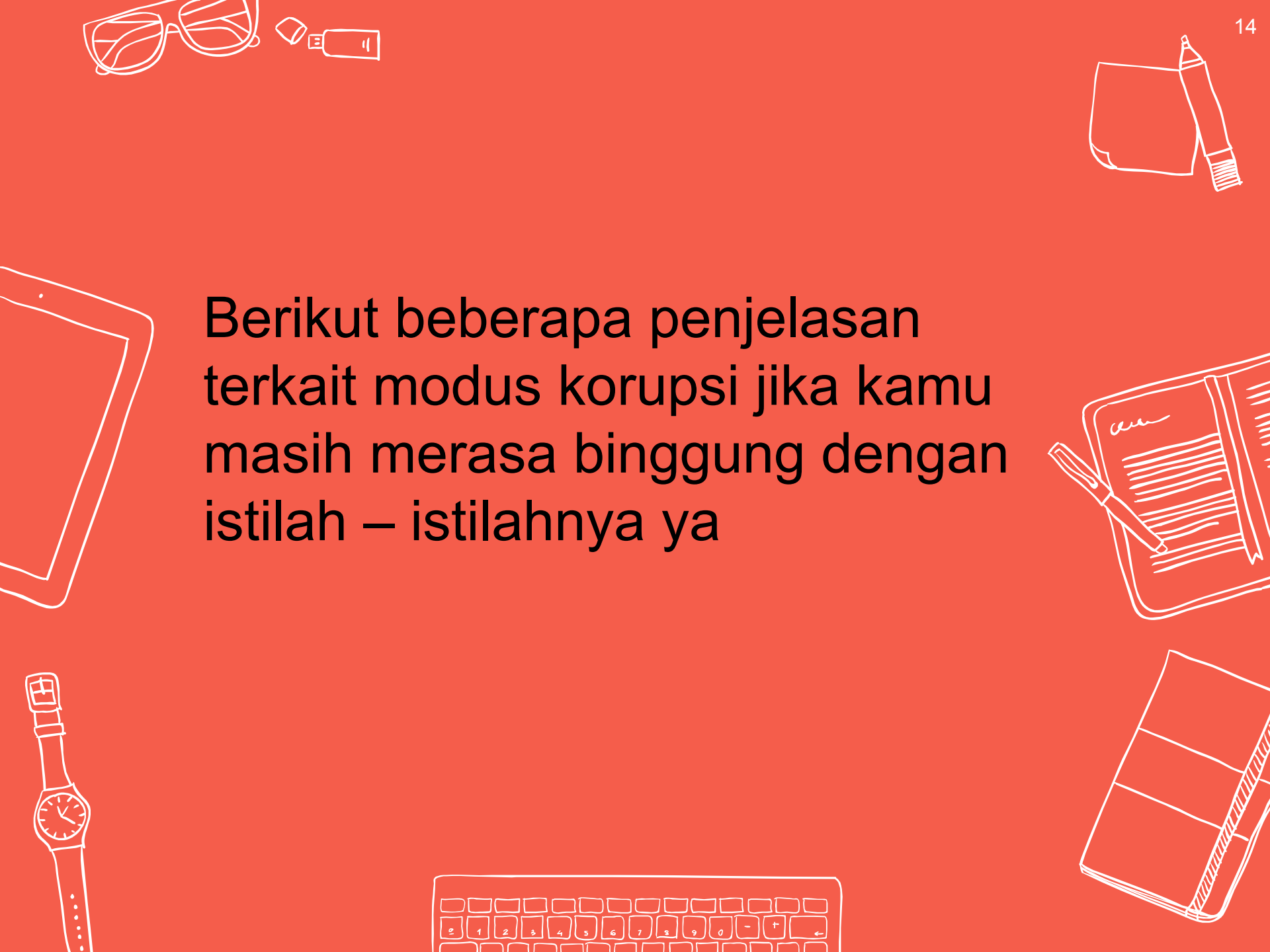
Kerugian negara yang diakibatkan oleh korupsi ini mencapai Rp 35 Miliar. Jumlah ini setara dengan 700.000 gelas kopi kekinian.



Thanks!



Berikut beberapa penjelasan terkait modus korupsi jika kamu masih merasa bingung dengan istilah – istilahnya ya



Mark up/ penggelembungan harga biasanya terjadi Ketika barang yang dibeli harganya Rp 10.000 namun dilaporkan disebutkan bahwa harga barang Rp 50.000

Suap-menyuap dapat dilakukan atas inisiatif penyelenggara negara maupun pihak swasta. Biasanya suap menyuap dilakukan agar seseorang melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Misalnya, sebuah perusahaan swasta memberikan suap kepada panitia pengadaan supaya memenangkan tender pemerintah

Penggelapan terjadi jika ada oknum tertentu yang menggunakan uang negara yang sedang dipegang dan dikelola untuk kepentingan pribadinya.

Penyalahgunaan anggaran terjadi Ketika anggaran sudah ditentukan untuk mengerjakan sebuah pengadaan namun dipergunakan untuk kegiatan lainnya, misal anggaran pembangunan jalan digunakan untuk pembelian mobil dinas

Kegiatan/ proyek fiktif terjadi ketika, ada anggaran yang dialokasikan untuk membeli kapal laut guna mendukung transportasi laut disebuah daerah. Kapal tersebut tidak dibeli namun pada laporan pertanggungjawaban disebutkan dibeli.

Laporan fiktif berarti laporan yang disampaikan tidak sesuai dengan yang sebenarnya dilakukan. Misal, sebuah unit kerja di suatu kementerian melakukan pelatihan. pada laporan disebutkan bahwa pelatihan dilakukan selama 5 hari, padahal hanya dilakukan selama 3 hari.

Pemerasan serupa dengan suap menyuap namun ada unsur tekanan/ kekerasan yang menyebabkan seseorang secara terpaksa harus memberikan sejumlah uang kepada pihak lain

Gratifikasi adalah memberikan sesuatu (uang/ barang/ diskon/ jasa) kepada penyelenggara negara meskipun ketika itu pihak yang memberikan tidak meminta imbalan tertentu.

Penyunatan/ pemotongan terjadi misalnya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 100 juta untuk pembangunan balai desa. Namun Ketika proses pembangunan, uang yang diberikan hanya Rp 50 juta, sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi oleh oknum pemerintah.

Pungutan liar terjadi ketika seorang oknum dari pemerintah meminta uang kepada perusahaan yang terpilih sebagai penyedia dalam pengadaan pemerintah tanpa dasar hukum yang jelas.